

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pendapatan perkapita merupakan salah satu faktor kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita berguna untuk menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah. Dalam rangka desentralisasi, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dana transfer kepada Pemerintah Daerah. Jika pendapatan perkapita meningkat, maka kemampuan masyarakat di suatu wilayah untuk memperoleh pendapatan rata-rata akan meningkat. Artinya, kemampuan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar juga akan meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan perkapita suatu daerah menurun, maka kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk memperoleh pendapatan rata-rata juga akan menurun. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar menurun, maka jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut meningkat. Berdasarkan interpretasi tersebut, PDRB per kapita berdampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) (Nurhamida, 2014) yang meliputi Provinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung, merupakan wilayah yang strategis dengan letaknya antara Ibu Kota Jakarta dan kawasan perdagangan internasional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Atma jaya, 2014). Selain itu, Sumsel termasuk salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Bahkan potensi batu bara di Sumsel mencapai 37% dari total potensi batu bara yang ada di Indonesia, lebih besar dari Provinsi Kalimantan Timur (35%) dan Provinsi Kalimantan Selatan (26%) (Widagdo dalam Atmajaya, 2014). Potensi dan letak Provinsi Sumsel yang strategis merupakan modal yang potensial bagi keberhasilan pembangunan. Hasil pembangunan menunjukkan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan perbaikan pemerataan pendapatan. Namun, Provinsi Sumsel yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi kesembilan di Indonesia, ternyata masih memiliki jumlah

penduduk miskin juga cukup tinggi, yaitu tertinggi kelima dibandingkan dengan provinsi yang lain pada tahun 2021 (BPS, 2021).

Salah satu perwujudan dari keberhasilan ekonomi Sumatera Selatan tersebut dapat terlihat dari besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung setiap tahunnya. PDRB dapat disebabkan sebagai alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, dan menjadi indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Peranan masing-masing sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan suatu daerah.

(dalam miliar)



Sumber : Data diolah peneliti (2022)

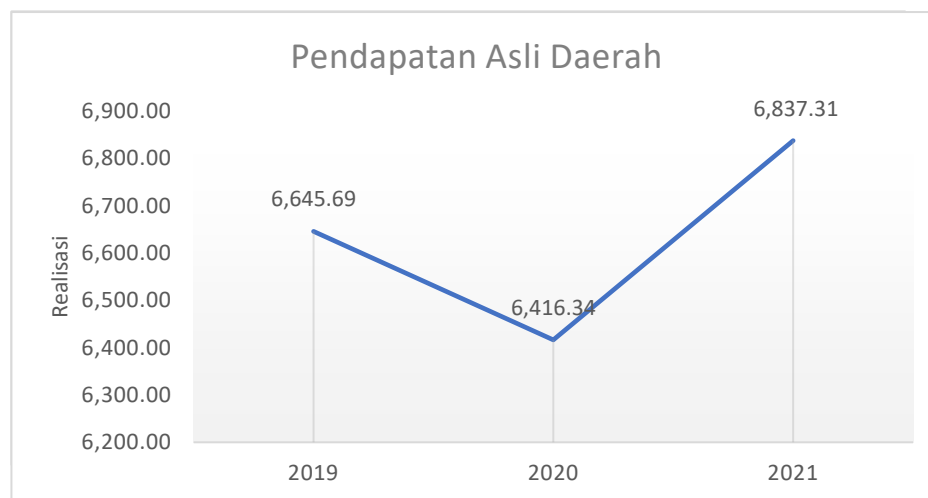
Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Per Kapita Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Data Pendapatan Perkapita tersebut dapat menggambarkan perekonomian wilayah Sumatera Selatan, yang dilihat dari tingkat PDRB berdasarkan harga konstan terjadi kenaikan di 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan per kapita pada Provinsi Sumatera Selatan, yang mana dari tahun 2019-2021 terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sarana untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat.

(dalam miliar)



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

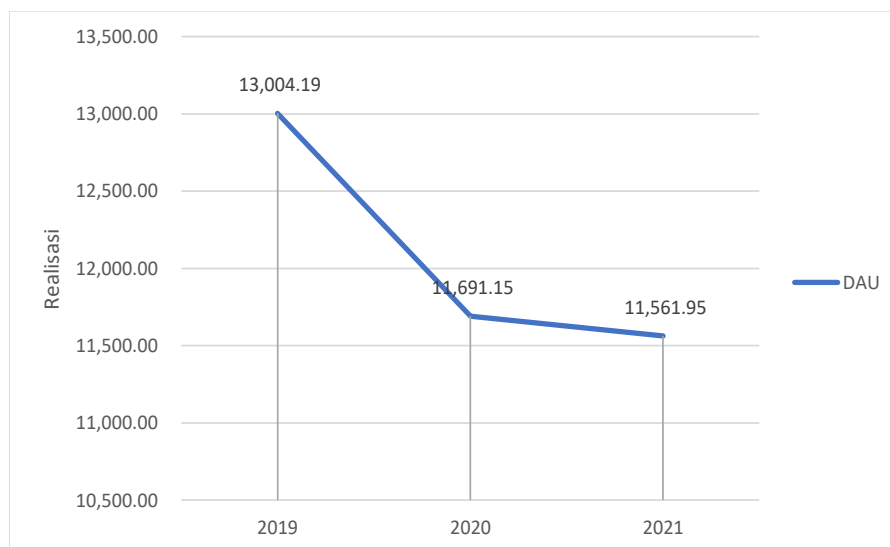
Gambar 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuatif pada setiap komponen pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan. Dimana pendapatan asli daerah yang terbesar di Sumatera Selatan adalah pada penerimaan pajak daerah, kemudian lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan dan retribusi daerah.

Pendapatan perkapita Pemerintah Daerah terlalu tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah guna mendanai kebutuhan daerah terkait pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Peranan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai pelayanan bagi masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah pusat. (Simanjuntak, 2002), transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah sangat berperan untuk menjamin tercapainya standar layanan publik minimum di seluruh negeri dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Selanjutnya dengan pemanfaatan sumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang optimal, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik masyarakat yang akan mendorong investor dalam melakukan kegiatan yang membantu perkembangan ekonomi daerah. Kondisi demikian akan secara langsung meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Saat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka Pemerintah Daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa DAU merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dalam peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah.

(dalam miliar)



Sumber : Data diolah peneliti (2022)

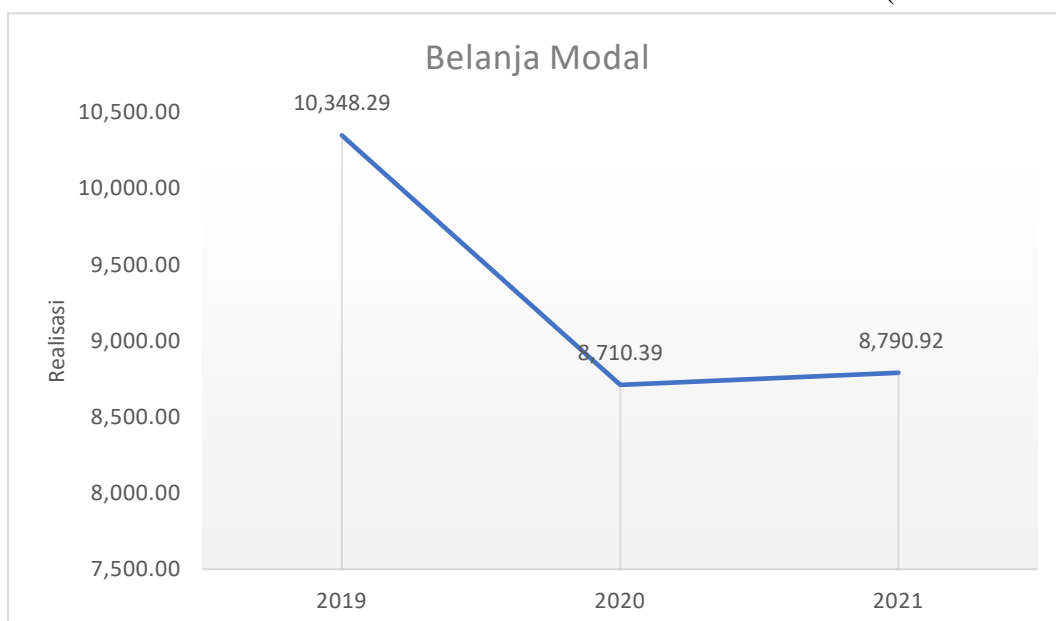
Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa dana alokasi umum di provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019

sampai ke 2021. Sehingga, dari hal tersebut Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah.

Kualitas pelayanan publik berhubungan dengan tingkat belanja modal daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan pra sarana untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Situngkir, 2009). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah untuk pembentukan modal daerah dalam peningkatan kualitas daerah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Dalam hal pembiayaan belanja modal, pemerintah daerah dituntut agar menggunakan anggaran pengeluaran yang mampu membangun kemandirian ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diwujudkan oleh peningkatan pendapatan perkapita. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

(dalam miliar)



Sumber : Data diolah peneliti (2022)

Gambar 1.4 Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 yang mengalami penurunan belanja modal dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat pengalokasian dana belanja modal yang dialihkan ke belanja lainnya, dalam hal ini salah satunya adanya perubahan atas penanganan pandemi di Sumatera Selatan.

Pemerintah kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Selatan diharapkan untuk dapat mengendalikan keuangan daerah secara optimal, efisien, ekonomis dan efektif. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya adalah seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya potensi sumber daya alam, terbatasnya anggaran pembiayaan daerah dan sebagainya. Munir (2004) mengemukakan bahwa anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Yustriawan, 2021)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Per kapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Per Kapita pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Per Kapita pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Per Kapita pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan (DAU) dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Per Kapita pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2021”.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2021.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti mengenai bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita.

2. Bagi para Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akuntansi sektor publik dan dapat memberi masukan dalam perkembangan akuntansi sektor publik.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian lanjutan pada bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi Pemerintah, khususnya pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mengenai laporan keuangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5. Untuk mengetahui manfaat dari Pendapatan Per Kapita, yaitu:
 - Mengetahui tingkat perekonomian suatu negara, dilihat dari tinggi rendahnya perhitungan pendapatan perkapita.
 - Mengetahui tingkat kemakmuran populasi suatu negara.
 - Sebagai pembanding tingkat perekonomian antara suatu negara dengan negara lainnya.